

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM ERA KETIDAKPASTIAN: KASUS PROGRAM MAKAN GRATIS DAN KRISIS LEGITIMASI DI INDONESIA 2025

Nuraini Kusuma Andriyani^{1*}, Nabila Septia Rosa²

¹Universitas Nusa Cendana, Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: nuraini.andriyani@staf.undana.ac.id

Abstract

Era ketidakpastian telah menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, terutama ketika pemerintah dituntut untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat di tengah kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Salah satu kebijakan strategis di Indonesia pada tahun 2025 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Meskipun memiliki tujuan yang positif, implementasi program ini memunculkan berbagai perdebatan terkait kesiapan fiskal, kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas pelaksanaannya yang berimplikasi pada munculnya krisis legitimasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks era ketidakpastian serta menjelaskan bagaimana tantangan implementasi berkontribusi terhadap terbentuknya krisis legitimasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media massa yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi yang meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, kompleksitas tata kelola, koordinasi antar-aktor, dan pengawasan program memengaruhi legitimasi kebijakan pada dimensi input legitimacy, throughput legitimacy, dan output legitimacy. Penelitian ini menemukan bahwa krisis legitimasi tidak semata-mata disebabkan oleh substansi kebijakan, melainkan oleh kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas implementasi pemerintah dalam mengelola kebijakan pada situasi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan kebijakan publik.

Kata Kunci: kebijakan publik, ketidakpastian, legitimasi kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis, tata kelola pemerintahan.

PENDAHULUAN

Era ketidakpastian (era of uncertainty) telah menjadi karakteristik utama tata kelola pemerintahan kontemporer. Kompleksitas permasalahan publik yang semakin tinggi, perubahan sosial-politik yang cepat, disrupsi teknologi, tekanan ekonomi global, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut pemerintah untuk

menghasilkan kebijakan yang adaptif dan responsif. Dalam kondisi tersebut, keberhasilan kebijakan publik tidak lagi hanya ditentukan oleh aspek teknokratis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat (Peters, 2019).

Dalam perspektif administrasi publik modern, legitimasi merupakan elemen fundamental yang menentukan keberlangsungan suatu kebijakan. Kebijakan yang memperoleh legitimasi tinggi cenderung mendapatkan dukungan publik sehingga implementasinya berjalan lebih efektif. Sebaliknya, ketika masyarakat mempertanyakan tujuan, proses, maupun hasil suatu kebijakan, maka dapat muncul krisis legitimasi yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah (Beetham, 2013; Pierre & Peters, 2020).

Dalam konteks Indonesia, salah satu kebijakan publik yang menjadi perhatian nasional pada tahun 2025 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan agenda prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendukung visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Program tersebut juga diproyeksikan memiliki dampak ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di berbagai daerah (Suprpto, 2025).

Program MBG mulai diimplementasikan secara nasional pada Januari 2025. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini telah menjangkau ratusan ribu peserta didik melalui ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hingga akhir Januari 2025, program telah berjalan di sebagian besar wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat (Media Keuangan).

Secara normatif, Program MBG memperoleh dukungan karena dianggap mampu menjawab berbagai persoalan mendasar pembangunan manusia, khususnya masalah gizi, ketimpangan akses pangan bergizi, dan kualitas kesehatan anak. Berbagai kajian menunjukkan bahwa program pemberian makanan bergizi di sekolah memiliki potensi meningkatkan kualitas kesehatan, konsentrasi belajar, dan produktivitas generasi muda dalam jangka panjang (Nurmansyah & Fitriani, 2025; Nango et al., 2025).

Namun demikian, implementasi Program MBG juga memunculkan berbagai perdebatan dan kritik di ruang publik. Sejumlah kajian mengidentifikasi tantangan berupa kesiapan kelembagaan, kapasitas pelaksana, efektivitas distribusi, pengawasan kualitas makanan, keberlanjutan pendanaan, serta koordinasi antarinstansi sebagai faktor yang dapat

memengaruhi keberhasilan program (Suprpto, 2025; Mulyani, 2025). Selain itu, beberapa penelitian menyoroti adanya dilema antara ambisi perluasan cakupan program dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pelaksanaannya (Herdiana, 2025; Kiftiyah et al., 2025).

Perdebatan mengenai Program MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh dimensi politik dan legitimasi kebijakan. Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, MBG menjadi objek perhatian publik yang tinggi sehingga setiap keberhasilan maupun kendala implementasi secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kapasitas pemerintah. Kajian Masruri dan Nugraha (2026) menunjukkan bahwa MBG tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memiliki konsekuensi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di era digital, tantangan legitimasi kebijakan menjadi semakin kompleks karena masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi dan ruang partisipasi publik. Media sosial memungkinkan masyarakat memberikan respons secara langsung terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Kondisi ini menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih dinamis sekaligus rentan terhadap polarisasi opini publik. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan pada era ketidakpastian tidak hanya bergantung pada hasil kebijakan (output legitimacy), tetapi juga pada kualitas proses kebijakan (process legitimacy), transparansi, dan akuntabilitas pemerintah (Scharpf, 1999; Ansell & Torfing, 2021).

Fenomena Program MBG tahun 2025 menjadi kasus yang menarik untuk mengkaji hubungan antara kebijakan publik, ketidakpastian, dan legitimasi pemerintahan. Di satu sisi, program ini memiliki tujuan yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, berbagai tantangan implementasi, perdebatan anggaran, kapasitas tata kelola, serta beragam respons publik menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, melainkan juga oleh kemampuan membangun dan mempertahankan legitimasi publik selama proses implementasi berlangsung (journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id)

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 mencerminkan dinamika kebijakan publik dalam era ketidakpastian dan bagaimana tantangan implementasi yang muncul berkontribusi terhadap terbentuknya krisis legitimasi kebijakan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pentingnya legitimasi sebagai fondasi keberhasilan kebijakan publik di tengah lingkungan yang semakin kompleks dan tidak pasti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 dalam konteks kebijakan publik di era ketidakpastian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam hubungan antara proses implementasi kebijakan, respons publik, dan munculnya fenomena krisis legitimasi yang berkembang selama pelaksanaan program.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi kementerian dan lembaga terkait, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media massa yang membahas Program Makan Bergizi Gratis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan, tantangan pelaksanaan, respons masyarakat, dan legitimasi kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan ketidakpastian kebijakan, tata kelola program, dan legitimasi publik. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif legitimasi kebijakan publik yang mencakup dimensi *input legitimacy*, *throughput legitimacy*, dan *output legitimacy* (Scharpf, 1999). Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen pemerintah, publikasi akademik, laporan lembaga independen, dan media massa. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan serta bagaimana berbagai tantangan yang muncul berkontribusi terhadap terbentuknya krisis legitimasi kebijakan publik di Indonesia pada tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Makan Bergizi Gratis dalam Konteks Kebijakan Publik Era Ketidakpastian

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi stunting, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menargetkan jutaan penerima manfaat yang terdiri atas siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Secara konseptual, MBG tidak hanya diposisikan sebagai

kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan manusia dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Namun demikian, implementasi program berlangsung dalam lingkungan kebijakan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut muncul dari berbagai faktor, seperti keterbatasan fiskal, perubahan kondisi ekonomi nasional dan global, kesiapan kelembagaan, kapasitas birokrasi, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keberhasilan program. Kondisi ini menunjukkan karakteristik era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang semakin memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, situasi tersebut menempatkan pemerintah pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk segera merealisasikan janji politik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kesiapan sumber daya, efektivitas tata kelola, dan keberlanjutan pendanaan program. Ketegangan antara tuntutan politik dan kapasitas implementasi inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber munculnya perdebatan publik terhadap Program MBG.

2. Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

a. Tantangan Pendanaan dan Keberlanjutan Fiskal

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan Program MBG secara nasional. Sebagai program dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, MBG membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam berbagai diskursus publik, muncul kekhawatiran bahwa pembiayaan program berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan kemungkinan terjadinya pengurangan alokasi pada sektor pembangunan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

b. Tantangan Tata Kelola dan Koordinasi Antar-Lembaga

Implementasi MBG melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia bahan pangan, hingga masyarakat lokal. Kompleksitas aktor yang terlibat menuntut adanya koordinasi yang efektif agar program dapat berjalan sesuai tujuan. Temuan menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi berpotensi menimbulkan perbedaan

kapasitas implementasi antarwilayah. Beberapa daerah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan sarana distribusi, tenaga pelaksana, maupun sistem pengawasan. Variasi kapasitas tersebut berpotensi menghasilkan kualitas layanan yang berbeda-beda sehingga memengaruhi persepsi publik terhadap program.

c. Tantangan Pengawasan dan Akuntabilitas

Program yang melibatkan distribusi sumber daya dalam jumlah besar memiliki risiko tata kelola yang tinggi. Dalam konteks MBG, aspek pengawasan menjadi penting untuk memastikan kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi penggunaan anggaran. Kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat dapat memunculkan potensi penyimpangan, inefisiensi, maupun praktik maladministrasi. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Krisis Legitimasi Kebijakan dalam Implementasi Program MBG

a. *Krisis Input Legitimacy*

Menurut Scharpf (1999), *input legitimacy* berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus MBG, berbagai kritik muncul karena sebagian kelompok masyarakat menilai bahwa proses perumusan kebijakan lebih didominasi oleh pendekatan top-down dibandingkan partisipasi publik yang luas. Keterbatasan ruang konsultasi publik menyebabkan sebagian kelompok merasa tidak terlibat dalam proses perencanaan program. Akibatnya, muncul berbagai persepsi dan interpretasi yang berbeda mengenai tujuan, manfaat, maupun prioritas kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya dibangun melalui kewenangan formal pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

b. *Krisis Throughput Legitimacy*

Throughput legitimacy merujuk pada kualitas proses kebijakan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola. Temuan menunjukkan bahwa berbagai perdebatan publik mengenai mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan sistem pengawasan mencerminkan adanya tantangan pada dimensi ini. Di era digital, masyarakat menuntut keterbukaan informasi yang lebih tinggi. Ketika informasi mengenai implementasi

program tidak tersampaikan secara jelas, ruang publik cenderung diisi oleh spekulasi dan berbagai narasi yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, kualitas komunikasi kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi proses.

c. Krisis Output Legitimacy

Output legitimacy berkaitan dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat dari suatu kebijakan. Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat positif, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, legitimasi hasil sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menunjukkan manfaat yang konkret, terukur, dan dapat dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat. Ketika manfaat program belum dirasakan secara merata atau muncul berbagai kendala implementasi di lapangan, sebagian masyarakat cenderung mempertanyakan efektivitas kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan substansi kebijakan harus diikuti dengan keberhasilan implementasi agar mampu menghasilkan legitimasi yang kuat.

4. Strategi Pemulihan Legitimasi Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis legitimasi dalam Program MBG tidak semata-mata disebabkan oleh tujuan kebijakan yang keliru, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh tantangan implementasi dan komunikasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya pemulihan legitimasi perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperluas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi serta pengembangan program. Kedua, transparansi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program harus ditingkatkan melalui sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses publik. Ketiga, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk memastikan kualitas layanan dan efektivitas program. Keempat, pemerintah harus mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif guna mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola publik, legitimasi bukanlah kondisi yang bersifat permanen, melainkan harus terus dibangun dan dipelihara melalui proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan Program MBG pada masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola ketidakpastian sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa krisis legitimasi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 merupakan konsekuensi dari interaksi antara kondisi ketidakpastian kebijakan dengan berbagai tantangan implementasi yang dihadapi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program memiliki tujuan sosial yang kuat dan memperoleh dukungan normatif dari masyarakat, berbagai persoalan dalam aspek pendanaan, tata kelola, koordinasi kelembagaan, dan akuntabilitas telah memengaruhi tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Dalam konteks era ketidakpastian, pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan kebijakan yang cepat dan responsif, namun pada saat yang sama harus memastikan kesiapan sumber daya dan efektivitas implementasi. Ketika kapasitas implementasi tidak sepenuhnya mampu mengimbangi ekspektasi publik yang tinggi, maka muncul kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut selanjutnya memengaruhi tiga dimensi legitimasi kebijakan, yaitu *input legitimacy*, *throughput legitimacy*, dan *output legitimacy*.

Pada dimensi *input legitimacy*, keterbatasan partisipasi publik dan minimnya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang memiliki keterikatan terhadap program. Pada dimensi *throughput legitimacy*, munculnya kritik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola program memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses implementasi. Sementara itu, pada dimensi *output legitimacy*, berbagai kendala teknis dan belum meratanya manfaat program menyebabkan sebagian masyarakat mempertanyakan efektivitas hasil kebijakan.

Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam era ketidakpastian, keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menghasilkan kebijakan yang baik (*good policy*), tetapi juga pada kemampuan membangun tata kelola yang baik (*good governance*) dan legitimasi publik yang kuat (*strong public legitimacy*). Dengan demikian, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis maupun kebijakan strategis lainnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola hubungan antara kapasitas implementasi, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi kebijakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 merepresentasikan dinamika kebijakan publik yang berlangsung dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia tersebut menghadapi berbagai tantangan implementasi yang berkaitan dengan kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, koordinasi antar-aktor, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan dan desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kompleksitas dan ketidakpastian selama proses implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi Program MBG berkontribusi terhadap munculnya gejala krisis legitimasi pada tiga dimensi utama. Pada aspek *input legitimacy*, keterbatasan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan memengaruhi tingkat penerimaan publik terhadap program. Pada aspek *throughput legitimacy*, berbagai perdebatan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas proses implementasi. Sementara itu, pada aspek *output legitimacy*, munculnya kendala dalam pelaksanaan program dan belum meratanya manfaat yang dirasakan masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hasil kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa krisis legitimasi tidak semata-mata disebabkan oleh substansi Program Makan Bergizi Gratis, melainkan oleh adanya kesenjangan antara ekspektasi publik yang tinggi dan kapasitas implementasi pemerintah dalam mengelola kebijakan pada situasi yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks tersebut, legitimasi kebijakan menjadi faktor strategis yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan keberlanjutan program di masa mendatang.

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan model hubungan antara ketidakpastian kebijakan (*policy uncertainty*), kapasitas tata kelola (*governance capacity*), legitimasi publik (*public legitimacy*), dan keberlanjutan kebijakan (*policy sustainability*). Temuan ini mempertegas bahwa kemampuan pemerintah dalam membangun partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik merupakan prasyarat penting untuk mempertahankan legitimasi kebijakan di era ketidakpastian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan

Pemerintah perlu memperluas keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan kelompok sasaran dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengembangan Program Makan Bergizi Gratis guna memperkuat *input legitimacy*.

2) Memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi

Pemerintah perlu menyediakan sistem informasi publik yang mudah diakses terkait alokasi anggaran, cakupan penerima manfaat, mekanisme distribusi, dan capaian program guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses implementasi.

3) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga independen untuk memastikan kualitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi berbagai permasalahan implementasi sejak dini.

4) Memperkuat koordinasi antar-lembaga

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia layanan pangan, dan aktor terkait lainnya perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif guna mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

5) Meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan

Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data untuk mengurangi kesenjangan informasi serta meminimalkan munculnya persepsi negatif terhadap program.

REFERENSI

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Oxford University Press.
- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan. Konsep legitimasi Beetham menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan antara kekuasaan, penerimaan publik, dan keberlanjutan pemerintahan.
- Herdiana, D. (2025). Tantangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 29(1), 45–61.
- Kiftiyah, N., Rahman, A., & Prasetyo, B. (2025). Governance challenges in implementing Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *Journal of Public Policy and Governance*, 8(2),

112–128.

- Masruri, M., & Nugraha, A. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan dinamika legitimasi kebijakan publik di Indonesia. *Review of Indonesian Governance and Social Studies*, 5(1), 1–15.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyani, S. (2025). Tata kelola dan keberlanjutan fiskal Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 33–49.
- Nango, Y., Setiawan, D., & Kurniawati, E. (2025). School feeding program and human capital development: Evidence from Indonesia. *Journal of Social Policy Studies*, 14(2), 87–103.
- Nurmansyah, R., & Fitriani, D. (2025). Program makan bergizi dan peningkatan kualitas kesehatan anak sekolah di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(1), 25–39.
- Peters, B. G. (2019). *Governing in a time of global crises: The good, the bad, and the merely normal*. Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Scharpf, F. W. (1999). *Governing in Europe: Effective and democratic?* Oxford University Press.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.
- Suprpto, F. A. (2025). A policy implementation review of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 9(4), 1–17.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Ashshiddiqi, M. T. (2021). Perspektif legitimasi dalam manajemen birokrasi dan administrasi negara. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 3(2), 45–57.
- Camico, D. B. (2024). Legitimasi praktis dalam lingkup sosial politik: Sebuah analisis bibliometrik. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(1), 12–28.
- Mardiyanta, A. (2011). Kebijakan publik deliberatif dalam perspektif governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 259–276. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi, keterlibatan multi-aktor, dan governance dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
- Zakiyah, Z. (2024). Diskursus publik dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan dalam perspektif Habermas. *Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik*, 6(1), 55–68. Kajian ini menjelaskan bahwa komunikasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif berkontribusi pada peningkatan legitimasi kebijakan publik.